

KONSEP *RWA BHINEDA* SEBAGAI PARADIGMA PLURALISME DALAM KEBERAGAMAN AGAMA DI BALI

Selvyani
UPT SMP Negeri 4 Mappedeceng
Email : selpi_samadhi@yahoo.com

ABSTRAK

Rwa Bhineda merupakan konsep filosofis dalam tradisi Hindu Bali yang menekankan dualitas sebagai hakikat keseimbangan kosmis, seperti terang dan gelap, baik dan buruk, serta sakral dan profan. Dalam konteks sosial keagamaan, Rwa Bhineda tidak hanya merepresentasikan dualisme ontologis, tetapi juga mencerminkan etos toleransi dan harmoni dalam keberagaman. Artikel ini mengkaji bagaimana konsep Rwa Bhineda berfungsi sebagai paradigma pluralisme dalam lanskap keberagaman agama di Bali yang plural dan dinamis. Dengan menggunakan pendekatan teologi kontekstual dan metodologi kualitatif-hermeneutik, artikel ini menelusuri pemaknaan simbolik dan praksis budaya Rwa Bhineda dalam relasi antarumat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bali, melalui pemahaman terhadap Rwa Bhineda, mengembangkan semangat hidup berdampingan secara inklusif dan tidak antagonistik, bahkan terhadap kelompok agama minoritas. Konsep ini tidak merelatifkan kebenaran religius, tetapi mengafirmasi keberadaan nilai-nilai spiritual lain sebagai bagian dari sistem keseimbangan universal. Selain itu, implementasi Rwa Bhineda dalam ruang publik – baik melalui ritual, hukum adat, maupun pendidikan budaya – membentuk landasan etis bagi pluralisme yang berakar pada kearifan lokal. Dengan demikian, Rwa Bhineda bukan hanya warisan filosofis, tetapi juga paradigma etis-spiritual yang relevan untuk membangun kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Kajian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai Rwa Bhineda dalam kebijakan publik dan dialog lintas agama untuk memperkuat pluralisme yang kontekstual dan berkelanjutan di Bali.

Kata Kunci: *Rwa Bhineda*, pluralisme agama, teologi kontekstual, toleransi, kearifan lokal Bali

ABSTRACT

Rwa Bhineda is a philosophical concept in Balinese Hindu tradition that emphasizes duality as the essence of cosmic balance, such as light and darkness, good and evil, and the sacred and profane. In the socio-religious context, Rwa Bhineda represents not only ontological dualism but also reflects an ethos of tolerance and harmony within diversity. This article examines how the concept of Rwa Bhineda functions as a paradigm of pluralism in Bali's dynamic and plural religious landscape. Employing a contextual theological approach and qualitative-hermeneutic methodology, the article explores the symbolic meanings and cultural praxis of Rwa Bhineda in interreligious relations. The findings reveal that Balinese communities, through their understanding of Rwa Bhineda, cultivate an inclusive and non-antagonistic coexistence, even towards religious minorities. This concept does not relativize religious truths but affirms the existence of other spiritual values as part of a universal system of balance. Furthermore, the implementation of Rwa Bhineda in public spheres—through rituals, customary law, and cultural education—serves as an ethical foundation for a form of pluralism rooted in local wisdom. Thus, Rwa Bhineda is not merely a philosophical legacy but an ethical-spiritual paradigm relevant to fostering social cohesion in multicultural societies. The study recommends integrating Rwa Bhineda's values into public policy and interfaith dialogue to strengthen a contextual and sustainable pluralism in Bali.

Keywords: *Rwa Bhineda*, religious pluralism, contextual theology, tolerance, Balinese local wisdom

PENDAHULUAN

Konsep Rwa Bhineda merupakan salah satu prinsip dasar dalam kosmologi dan filsafat hidup masyarakat Hindu Bali yang mengandung pemahaman akan keberadaan dua hal yang berlawanan namun saling melengkapi. Dalam tradisi lokal Bali, Rwa Bhineda secara etimologis berasal dari kata *rwa* yang berarti dua, dan *bhineda* yang berarti berbeda (Titib, 2003). Maka secara harfiah, Rwa Bhineda berarti "dua yang berbeda", namun dalam praksisnya, makna tersebut melampaui dikotomi semantik menjadi fondasi ontologis dan epistemologis terhadap cara pandang masyarakat Bali dalam memahami realitas yang bersifat dualistik sekaligus holistik. Konsep ini tidak memisahkan perbedaan sebagai kontradiksi absolut, melainkan sebagai relasi dialektis yang mengarah pada keharmonisan kosmis.

Dalam konteks teologis dan antropologis, Rwa Bhineda merefleksikan prinsip *dharma* dalam mewujudkan keseimbangan antara *purusha* (roh) dan *prakriti* (materi), yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali melalui beragam bentuk simbolik, arsitektural, dan ritus-ritus religius (Lansing, 2006; Eiseman, 1990). Hal ini dapat diamati dalam struktur ruang pura yang membagi area menjadi *utama mandala*, *madya mandala*, dan *nista mandala*—sebuah ekspresi spasial dari pemahaman Rwa Bhineda terhadap hirarki sakralitas.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sosial dan interaksi antaragama di Bali—baik melalui migrasi, pariwisata, maupun dinamika politik identitas—konsep Rwa Bhineda menjadi semakin relevan sebagai paradigma kultural dan spiritual dalam memaknai pluralisme agama. Pluralisme, dalam pengertian akademik, tidak sekadar keberadaan ragam keyakinan, tetapi merupakan pengakuan aktif terhadap keberagaman sebagai nilai yang setara dan konstruktif (Eck, 2001). Di sinilah letak pentingnya menjadikan Rwa Bhineda bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi sebagai paradigma yang mampu menjembatani relasi lintas agama secara damai dan produktif.

Pendekatan pluralistik yang bersumber dari nilai-nilai lokal seperti Rwa Bhineda menawarkan alternatif terhadap model pluralisme liberal Barat yang cenderung berangkat dari asumsi sekular dan individualistik. Sebaliknya, Rwa Bhineda berakar dalam spiritualitas komunal dan relasional khas masyarakat Bali yang bersifat holistik dan kontekstual. Sebagai contoh, toleransi antarumat beragama di Bali sering kali tidak diformulasikan dalam wacana formal legalistik, melainkan melalui mekanisme sosial-kultural seperti *adat desa*, *karma desa*, dan sistem *desa pakraman* yang menginternalisasi etika Rwa Bhineda dalam praktik kolektif (Ardhana, 2012; Suamba, 2020).

Lebih lanjut, pemaknaan Rwa Bhineda sebagai paradigma pluralisme juga dapat dikaji dari sudut pandang teologi kontekstual. Dalam pendekatan ini, teologi tidak dibangun secara normatif-dogmatik, tetapi dikonstruksi berdasarkan dialog antara teks-teks keagamaan dan konteks sosial budaya (Bevans, 2002). Rwa Bhineda, dalam hal ini, menjadi titik temu antara nilai spiritual Hindu Bali dan semangat keterbukaan terhadap yang liyan. Dengan demikian, nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, dan penghargaan terhadap kesakralan hidup bersama menjadi aspek integral dari spiritualitas pluralisme yang bersumber dari kearifan lokal.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Rwa Bhineda dapat dijadikan paradigma pluralisme dalam merespons keberagaman agama di Bali. Dengan menggunakan pendekatan teologi kontekstual dan metodologi kualitatif-hermeneutik, penulis akan menelusuri bagaimana pemaknaan simbolik dan praksis nilai-nilai Rwa Bhineda berperan dalam membentuk etos sosial yang toleran dan inklusif. Kajian ini juga hendak menekankan bahwa pluralisme berbasis lokal bukanlah relativisme teologis,

melainkan afirmasi spiritual terhadap keberagaman sebagai kehendak kosmis yang saling melengkapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-hermeneutik dalam kerangka teologi kontekstual sebagai strategi utama untuk memahami konsep Rwa Bhineda sebagai paradigma pluralisme dalam keberagaman agama di Bali. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik objek kajian yang bersifat simbolik, kultural, dan spiritual, yang tidak dapat direduksi secara kuantitatif tetapi harus ditafsirkan melalui pemahaman makna, konteks sosial, dan pengalaman hidup kolektif masyarakat Bali. Secara metodologis, pendekatan hermeneutik merujuk pada metode interpretasi teks, simbol, dan praktik budaya-religius dengan memperhatikan horizon makna antara penafsir dan konteks lokal (Gadamer, 1975). Dalam konteks ini, penulis menafsirkan teks-teks suci Hindu Bali (seperti *Lontar Tutur Bhuwana*, *Lontar Dharma Prawerti*, dan penggalan-penggalan *Catur Veda* dalam versi lokal), serta simbol-simbol dualitas dalam arsitektur pura, seni pertunjukan, dan ritus keagamaan seperti *pemelastian*, *ngerebeg*, dan *panca yadnya*. Penelitian ini juga memanfaatkan teologi kontekstual (Bevans, 2002) untuk menjembatani pemahaman religius lokal dengan wacana global pluralisme. Teologi kontekstual memungkinkan peneliti mengembangkan refleksi teologis yang bersumber dari pengalaman umat dan narasi budaya setempat, bukan semata dari dogma universal yang ahistoris. Dengan demikian, nilai-nilai Rwa Bhineda ditafsirkan bukan hanya sebagai doktrin metafisik, tetapi juga sebagai etika sosial yang hidup dan berdialog dengan realitas pluralistik di Bali masa kini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan kajian pustaka. Observasi dilakukan di beberapa desa adat dan pura di wilayah Bali Utara dan Tengah, seperti di Desa Pakraman Sembiran, Desa Adat Penglipuran, dan Pura Samuan Tiga di Gianyar. Pengamatan difokuskan pada manifestasi konsep Rwa Bhineda dalam struktur sosial, relasi antarumat beragama, serta ekspresi simbolik dalam kegiatan ritual keagamaan. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap tokoh agama Hindu (sulinggih, pemangku), tokoh adat, pemuda lintas iman, dan akademisi bidang filsafat Bali serta antropologi agama. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-struktural agar memungkinkan penggalian data yang lebih terbuka dan reflektif. Pendekatan ini bertujuan menangkap pemahaman subjektif informan mengenai bagaimana mereka mengartikulasikan Rwa Bhineda dalam konteks keberagaman agama dan sosial saat ini. Kajian pustaka digunakan untuk mengkaji referensi primer dan sekunder yang relevan, termasuk teks-teks klasik Hindu, literatur akademik tentang pluralisme agama, serta studi etnografi dan sosiologi agama di Bali. Data dari pustaka dikaji secara dialogis untuk memperkuat refleksi teoretis dan mendukung validitas temuan lapangan. Analisis data dilakukan dengan model hermeneutika spiral, yakni melalui proses interpretasi yang terus menerus antara bagian dan keseluruhan (part-whole analysis), serta refleksi antara data lapangan dan kerangka teoretik. Proses ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam (*verstehen*) terhadap bagaimana Rwa Bhineda dipraktikkan sebagai paradigma etis dan spiritual dalam kehidupan pluralistik masyarakat Bali. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan data literatur. Selain itu, dilakukan *member checking* dengan mengkonfirmasi interpretasi awal kepada beberapa informan utama. Peneliti juga menyadari posisi subjektif sebagai bagian dari masyarakat Bali, sehingga refleksi kritis terhadap posisi diri (*refleksivitas*) menjadi bagian integral dari keseluruhan proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa konsep Rwa Bhineda tidak hanya hadir sebagai warisan filsafat keagamaan masyarakat Bali, tetapi telah menjelma menjadi kerangka nilai yang hidup (*living paradigm*) yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas, etika sosial, dan tatanan kosmik. Dalam konteks masyarakat Bali, Rwa Bhineda bukanlah

sekadar simbol dualitas, melainkan menjadi prinsip ontologis yang menjwai relasi antara manusia, alam, dan Tuhan (*Tri Hita Karana*). Konsep ini diinternalisasi dalam praktik sosial, spiritualitas harian, dan konstruksi etika kolektif yang mengatur kehidupan masyarakat secara holistik.

1. Pemaknaan Simbolik Rwa Bhineda dalam Tradisi Hindu Bali

Secara simbolik dan filosofis, Rwa Bhineda dimaknai sebagai prinsip dualitas kosmis yang saling melengkapi—bukan saling meniadakan. Dalam literatur klasik Bali seperti *Tattwa Jñāna* dan *Sarasamuscaya*, ajaran ini ditegaskan sebagai bagian integral dari pemahaman tentang *Jagat Alit* (mikrokosmos) dan *Jagat Agung* (makrokosmos), di mana seluruh realitas eksistensial terdiri dari pasangan-pasangan yang berlawanan namun bersinergi: terang-gelap, baik-buruk, maskulin-feminin, sakral-profana (Mudana, 2014; Astika, 2019). Ajaran ini menjadi fondasi pemahaman bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat relatif dan membutuhkan lawannya untuk dapat dimengerti dan dihargai. Dalam praktik budaya, hal ini tergambar secara nyata dalam arsitektur pura, struktur ruang sosial, dan simbolisme ritual. Di arsitektur suci Bali, misalnya, konsep ini diwujudkan dalam tiga bagian utama kompleks pura:

- *Utama Mandala* sebagai pusat spiritualitas (representasi sakral),
- *Madya Mandala* sebagai ruang interaksi sosial (transisi),
- *Nista Mandala* sebagai wilayah profana (duniawi).

Sebagaimana dijelaskan oleh *sulinggih* yang diwawancarai di Desa Pakraman Sembiran dan Penglipuran, pembagian ini bukanlah bentuk dikotomi hirarkis yang menilai satu lebih tinggi dari yang lain, melainkan bentuk keseimbangan eksistensial antara yang spiritual dan yang material, antara yang murni dan yang biasa (Wawancara, 2024). Dalam konteks ini, profana tidak dianggap kotor, tetapi sebagai bagian integral dari totalitas hidup manusia.

Lebih lanjut, nilai-nilai Rwa Bhineda juga tercermin dalam seni pertunjukan sakral, seperti tari Rejang Dewa dan Barong-Rangda. Dalam pertunjukan Barong-Rangda, misalnya, kebaikan (Barong) dan keburukan (Rangda) tidak dimaksudkan untuk saling memusnahkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa keduanya merupakan kekuatan kosmis yang harus dijaga keseimbangannya. Pertunjukan tersebut adalah simbol dramatik dari etika kosmologis masyarakat Bali, yakni bahwa harmoni tidak tercipta dari dominasi satu unsur atas yang lain, tetapi dari pengakuan terhadap eksistensi ganda yang saling membutuhkan (Bandem & deBoer, 1995). Bahkan dalam upacara keagamaan seperti piodalan, penggunaan warna hitam dan putih dalam kain *poleng* adalah bentuk konkret simbolisasi Rwa Bhineda. Kain *poleng* tidak hanya menjadi dekorasi ritus, tetapi juga penegas bahwa kekuatan baik dan buruk harus dikendalikan secara seimbang dalam diri manusia dan masyarakat.

Konsep ini kemudian berkembang menjadi etos budaya yang mengakar dalam sistem sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bali tidak melihat perbedaan (agama, suku, pandangan) sebagai potensi konflik, tetapi sebagai sesuatu yang perlu diposisikan secara harmonis dalam bingkai Rwa Bhineda. Ini tercermin dalam relasi antarumat yang relatif inklusif dan fleksibel, sebagaimana terlihat dalam partisipasi warga dalam upacara desa, meskipun berasal dari latar agama atau subkultur berbeda. Dalam hal ini, konsep Rwa Bhineda dapat dipahami sebagai basis teologi kontekstual Bali yang mengedepankan prinsip pluralitas spiritual yang saling menghidupi.

Secara akademik, temuan ini sejalan dengan argumentasi Alit Ambara (2020) yang menyatakan bahwa Rwa Bhineda telah menjadi "kosmologi sosial" dalam masyarakat Bali yang mengatur cara hidup kolektif dan cara mengelola perbedaan secara ritual dan kultural.

Dalam kerangka teologi kontekstual, nilai ini dapat dikembangkan sebagai narasi etika bersama yang merekognisi pluralitas tanpa kehilangan esensi spiritualitas lokal.

2. Implementasi *Rwa Bhineda* dalam Relasi Antarumat Beragama

Temuan lapangan menunjukkan bahwa konsep *Rwa Bhineda* telah mengalami transformasi dari doktrin filosofis menjadi prinsip etis dan praksis sosial yang secara nyata membentuk pola relasi antarumat beragama di Bali. *Rwa Bhineda*, sebagai prinsip dualitas harmonis, menyediakan kerangka kosmologis yang memungkinkan masyarakat Bali mengelola keberagaman secara konstruktif. Nilai ini tidak hanya diterapkan dalam praktik ritual atau estetika simbolik, tetapi juga dijadikan acuan dalam membangun relasi sosial, khususnya dalam konteks multikultural dan multireligius yang semakin kompleks.

Dalam wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh lintas agama di wilayah Buleleng (seperti Tejakula dan Sangsit) serta Gianyar (khususnya di sekitar Ubud dan Tampaksiring), ditemukan bahwa praktik toleransi di Bali tidak banyak dibingkai dalam narasi formal atau deklaratif seperti yang lazim dijumpai dalam diskursus negara-bangsa. Sebaliknya, toleransi di Bali berakar kuat pada tradisi lokal yang menjunjung tinggi etika *ngayah* (pengabdian kolektif) dan *tatwam asi* (pengakuan akan kesatuan esensial semua makhluk), serta pada kesadaran kosmologis akan perlunya menjaga keseimbangan antara unsur-unsur yang berbeda sebagai bentuk manifestasi nyata dari *Rwa Bhineda* (Tim Penyusun Lontar Bali, 2016).

Salah satu temuan menarik adalah bahwa masyarakat Hindu Bali tidak melihat keberadaan umat agama lain sebagai entitas asing yang mengancam kemurnian identitas keagamaan mereka. Sebaliknya, pluralitas dipahami sebagai ekspresi lain dari hukum dualitas yang inheren dalam alam semesta. *Rwa Bhineda*, dalam konteks ini, menjadi dasar bagi bentuk pluralisme kosmis: sebuah pengakuan bahwa perbedaan adalah keniscayaan eksistensial yang perlu dirawat, bukan dikaburkan atau diseragamkan. Hal ini mengingatkan pada konsep *inclusive pluralism* dalam filsafat agama yang dikembangkan oleh John Hick (1989), di mana kebenaran religius tidak dimonopoli oleh satu tradisi, tetapi diekspresikan secara berbeda oleh berbagai jalan spiritual yang sah.

Sebagai contoh konkret, di beberapa desa adat di Buleleng seperti Desa Sembiran dan Bondalem, umat Muslim dan Kristen yang telah menetap lama menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas lokal. Mereka tidak hanya hadir sebagai “tamu” dalam perayaan keagamaan Hindu seperti *piodalan* atau *odalan*, tetapi seringkali juga terlibat aktif dalam kerja bakti (*ngayah*) serta pengambilan keputusan adat yang berkaitan dengan *karma desa*. Hal ini memperlihatkan bagaimana perbedaan keagamaan tidak menegasikan solidaritas sosial, melainkan menjadi dasar bagi praktik *kohabitasi harmonis*, di mana setiap kelompok tetap mempertahankan identitas spiritualnya, sambil berkontribusi dalam ruang sosial yang sama.

Praktik semacam ini juga terlihat di Desa Penglipuran, yang kerap dijadikan model harmoni sosial Bali. Desa ini memiliki struktur sosial yang sangat berakar pada adat, namun terbuka terhadap keberadaan warga dari latar belakang agama dan etnis yang berbeda. Dalam pengamatan lapangan dan wawancara dengan aparat desa adat, ditemukan bahwa warga non-Hindu tetap diperkenankan menjalankan ibadah sesuai agama mereka masing-masing, namun pada saat yang sama mereka tetap terlibat dalam sistem sosial desa, termasuk dalam kegiatan adat seperti *subak*, *banjar*, dan *gotong royong*. Dengan demikian, batas-batas agama tidak dihapus, tetapi dijembatani melalui norma-norma adat yang berfungsi sebagai ruang interaksi lintas identitas (cf. Picard, 2008).

Dalam analisis teologi kontekstual, kondisi ini mencerminkan bentuk *pluralisme praksis*, yaitu penghayatan atas pluralitas agama yang dijalankan dalam tindakan konkret, bukan

sekadar sebagai konsep normatif. *Rwa Bhineda* menjadi "teologi lokal" yang menegaskan bahwa perbedaan bukan untuk diatasi melalui penyatuan homogen, melainkan dijaga dan dirawat melalui etika keseimbangan dan timbal balik. Hal ini memperkaya wacana interreligious theology, di mana kebenaran tidak dimonopoli secara eksklusif, tetapi dijalankan dalam semangat koeksistensi etis (Cornille, 2013).

Selain itu, sistem adat yang berbasis *desa pakraman* juga berperan besar dalam menjaga keterbukaan masyarakat Bali terhadap perbedaan agama. Karena sistem ini menekankan pada prinsip *karma desa*—yakni tanggung jawab terhadap desa tempat tinggal, bukan semata identitas keagamaan—maka semua warga, tanpa memandang agama, dianggap memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menjaga kelangsungan hidup sosial desa. Dengan kata lain, *karma desa* bertindak sebagai medium sekuler-sakral yang memungkinkan implementasi *Rwa Bhineda* dalam skala komunitas yang konkret dan berkesinambungan (Ardhana, 2012).

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali secara kultural telah mengembangkan suatu sistem nilai yang mendukung praktik pluralisme kultural dan spiritual yang kontekstual. *Rwa Bhineda* berfungsi sebagai *teologal grammar* lokal yang memfasilitasi integrasi perbedaan dalam sebuah sistem sosial yang harmonis. Dalam perspektif ini, pluralisme bukan sekadar toleransi pasif, tetapi *living pluralism* yang tumbuh dari akar budaya, spiritualitas, dan etika keseimbangan kosmis yang sangat khas Bali.

3. *Rwa Bhineda* sebagai Etika Pluralisme dan Model Teologi Kontekstual

Dalam kerangka teologi kontekstual, nilai-nilai lokal tidak sekadar dianggap sebagai ekspresi budaya yang bersifat partikular, melainkan sebagai sumber-sumber teologis yang sah dalam membangun refleksi spiritual yang otentik dan relevan dengan realitas lokal. Konsep *Rwa Bhineda*, sebagai prinsip dualitas kosmis yang harmonis dalam tradisi Hindu Bali, dapat diposisikan sebagai fondasi etika pluralisme dan juga sebagai model teologi kontekstual yang menjembatani antara spiritualitas lokal dan refleksi teologis global mengenai keberagaman dan koeksistensi.

Pluralisme sebagai Keterlibatan Aktif: Relevansi Pemikiran Diana Eck

Dalam pemikiran Diana L. Eck (2001), pluralisme bukanlah sekadar keberadaan banyak agama dalam satu wilayah (plurality), dan juga bukan toleransi dalam pengertian pasif. Pluralisme, menurut Eck, adalah keterlibatan aktif, dialogis, dan penuh komitmen terhadap keberagaman, di mana perbedaan tidak hanya diakui, tetapi dihargai dalam proses saling belajar dan saling memperkaya. Pandangan ini menemukan resonansi kuat dalam nilai-nilai *Rwa Bhineda*, yang menolak pandangan antagonistik terhadap perbedaan.

Dalam kosmologi Bali, perbedaan bukanlah deviasi dari norma, melainkan kondisi ontologis dasar kehidupan. Semua hal yang eksis selalu berada dalam relasi oposisi yang saling menopang: terang-gelap, baik-buruk, maskulin-feminin, tinggi-rendah, bahkan sakral-profane. Konsepsi ini menjadi basis dari penerimaan terhadap pluralitas, baik dalam dimensi sosial maupun spiritual. Dengan demikian, *Rwa Bhineda* bukan hanya simbol metafisik, tetapi juga menjadi etika ontologis yang memungkinkan keterbukaan terhadap "yang lain" sebagai bagian integral dari keberadaan kita.

Cosmotheandric Vision dan Integrasi Teologi: Perspektif Panikkar

Nilai *Rwa Bhineda* juga paralel dengan visi kosmoteandrik (*cosmotheandric vision*) dari Raimon Panikkar (1984), yang menekankan bahwa realitas tidak dapat dipahami secara utuh

jika kita memisahkan Tuhan (*theos*), manusia (*anthropos*), dan kosmos. Ketiganya adalah aspek-aspek yang saling terkait dalam struktur realitas yang integral. Dalam konteks Bali, pandangan ini mendapatkan bentuk konkret dalam ajaran *Tri Hita Karana*, yang merupakan manifestasi praktis dari hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan alam semesta (*palemahan*). *Rwa Bhineda* menjadi prinsip dasar yang mengatur keseimbangan ketiganya.

Lebih dari itu, *Rwa Bhineda* juga mencerminkan pemahaman bahwa setiap eksistensi memiliki tempat dan perannya masing-masing dalam struktur kosmos. Agama-agama lain tidak dilihat sebagai “yang asing” atau “yang salah”, melainkan sebagai bagian dari keragaman kosmis yang memperkaya keseluruhan harmoni spiritual. Dalam wawancara dengan tokoh agama Hindu di Bali, banyak yang menyatakan bahwa harmoni tidak tercipta dari penyeragaman, tetapi dari pengakuan terhadap *swadharma* masing-masing. Ini senada dengan pemikiran Paul Knitter (2002), yang melihat dialog antariman sebagai upaya bersama untuk mengenali kebenaran dalam keanekaragaman, bukan untuk mengklaim kebenaran tunggal secara eksklusif.

Teologi Kontekstual dan Spiritualitas Lokal: Menuju Paradigma Pluralisme Sakral

Dalam kerangka teologi kontekstual Asia, seperti yang dikembangkan oleh C.S. Song dan M.M. Thomas, nilai-nilai lokal—mitos, simbol, ritus, dan narasi spiritual—harus dijadikan titik tolak dalam membangun wacana teologis yang tidak hanya relevan, tetapi juga membumi. Teologi tidak dapat lagi hanya berakar pada narasi Barat atau kitab-kitab klasik, tetapi harus menyerap roh zaman dan realitas hidup masyarakat lokal. Dalam konteks ini, *Rwa Bhineda* memiliki potensi besar sebagai model teologi kontekstual Bali yang menggambarkan hubungan dinamis antara keterpisahan dan kesatuan, antara partikularitas dan universalitas, antara iman dan kebudayaan.

Dalam diskursus pluralisme teologis kontemporer, sering muncul perdebatan antara posisi eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Dalam kerangka *Rwa Bhineda*, kita dapat melihat semacam jalan tengah yang tidak terjebak pada relativisme ekstrem, tetapi tetap membuka ruang bagi kebenaran dalam keberagaman. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap agama memiliki posisi ontologisnya dalam jagat raya, sehingga relasi antaragama bukanlah tentang superioritas atau subordinasi, melainkan tentang koeksistensi dan keterhubungan kosmis. Ini memperkaya apa yang oleh Jacques Dupuis (2001) disebut sebagai *inclusive pluralism*—sebuah pandangan yang tidak mereduksi perbedaan menjadi kesamaan, tetapi merayakan distingsi sebagai bentuk kebijaksanaan ilahi.

Rwa Bhineda dalam Praksis Sosial-Spiritual: Harmoni sebagai Tanggung Jawab

Dalam praktik sosial masyarakat Bali, *Rwa Bhineda* tidak hanya menjadi kerangka pemikiran abstrak, tetapi dijalankan dalam berbagai bentuk: mulai dari penerimaan terhadap umat dari agama lain dalam struktur sosial desa, seperti terlihat di Desa Penglipuran atau Sembiran; hingga partisipasi aktif dalam kegiatan gotong-royong dan upacara bersama yang lintas identitas. Ini menunjukkan bahwa pluralisme yang dilandaskan pada *Rwa Bhineda* bukanlah gagasan normatif semata, tetapi telah menjadi praksis kultural dan spiritual yang menyatu dalam hidup sehari-hari.

Pluralisme dalam tradisi Bali tidak berhenti pada toleransi, tetapi melangkah lebih jauh menjadi bentuk kohabitasi spiritual yang memungkinkan hidup bersama dalam keragaman. Dengan demikian, *Rwa Bhineda* memberikan dasar etis bagi praktik pluralisme yang tidak sekadar formal atau administratif, tetapi bernilai sakral.

4. Rwa Bhineda dan Ketahanan Sosial Berbasis Budaya Lokal

Implementasi nilai-nilai *Rwa Bhineda* sebagai prinsip dualisme harmonis dalam tradisi Hindu Bali tidak hanya berdampak dalam ranah spiritual atau estetika, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat Bali. Salah satu manifestasi yang paling nyata adalah dalam ketahanan sosial—yakni kemampuan suatu komunitas untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan membangun kohesi di tengah tekanan, perubahan, atau potensi konflik sosial.

Studi menunjukkan bahwa tingkat kerukunan antarumat beragama di Bali secara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan banyak wilayah lain di Indonesia yang kerap mengalami friksi berbasis identitas, baik etnis maupun agama (Ardhana, 2012; Suamba, 2020; Suryani, 2004). Ketahanan sosial yang kuat ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh sistem nilai budaya yang hidup dan dinamis, yang salah satunya bersumber dari prinsip *Rwa Bhineda* sebagai epistemologi sosial.

Ketahanan Sosial sebagai Produk Epistemologi Budaya: Rwa Bhineda sebagai Modal Sosial

Dalam kerangka sosiologi budaya, *epistemologi sosial* merujuk pada cara berpikir dan mekanisme pengetahuan yang hidup dalam suatu komunitas, yang kemudian membentuk nilai, norma, dan perilaku kolektif (Geertz, 1973; Berger & Luckmann, 1966). *Rwa Bhineda* berfungsi sebagai epistemologi sosial dalam konteks Bali karena ia mengajarkan masyarakat bahwa realitas dunia tidak tunggal, tidak absolut, dan selalu berada dalam tegangan antara dua kutub eksistensial yang perlu diseimbangkan. Dengan cara pandang ini, masyarakat tidak diajarkan untuk memutlakkan satu posisi sebagai “kebenaran total” dan menolak yang lain sebagai “kesesatan.” Sebaliknya, perbedaan dipahami sebagai keniscayaan kosmis yang justru memperkaya kehidupan. Pola pikir ini berperan penting dalam mencegah berkembangnya sikap fanatisme, eksklusivisme, maupun fundamentalisme agama—tiga variabel utama yang sering menjadi pemicu konflik horizontal dalam masyarakat multikultural (Effendy, 2003; Mudhofir & Abdullah, 2021).

Reproduksi Nilai melalui Pendidikan Nonformal dan Seni Budaya

Ketahanan sosial ini tidak bersifat spontan atau instan, melainkan dibangun dan direproduksi secara berkelanjutan melalui berbagai kanal budaya, termasuk sistem pendidikan nonformal seperti *pasraman*, pertunjukan seni (seperti *wayang kulit*, *gambuh*, *tari barong*), hingga praktik kehidupan desa adat. Dalam *pasraman*, misalnya, anak-anak dan remaja Hindu Bali tidak hanya diajarkan ajaran keagamaan secara doktrinal, tetapi juga nilai-nilai etika yang melekat pada *Rwa Bhineda*, seperti sikap toleran, sabar, dan seimbang dalam melihat perbedaan. Hal ini menjadi benteng ideologis terhadap penyebaran paham-paham radikal yang mencoba masuk melalui pendidikan agama yang eksklusif.

Seni pertunjukan juga memainkan peran pedagogis yang signifikan. Dalam pertunjukan *Barong-Rangda*, misalnya, masyarakat Bali menyaksikan simbolisasi konflik abadi antara kekuatan baik dan buruk yang tidak pernah saling mengalahkan secara final, tetapi selalu kembali pada posisi seimbang. Ini menciptakan pemahaman bawah sadar yang kuat bahwa konflik adalah bagian dari siklus kehidupan yang harus dikelola, bukan dimusnahkan. Pertunjukan semacam ini bukan sekadar hiburan, tetapi berfungsi sebagai mekanisme enkulturasi nilai-nilai perdamaian dan kebersamaan (Bandem & deBoer, 1995).

Desa Adat sebagai Arena Ketahanan Sosial

Desa adat di Bali memainkan peran penting sebagai institusi sosial yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai *Rwa Bhineda* dalam kehidupan sehari-hari. Dalam struktur desa adat, identitas agama tidak menjadi pembatas utama dalam partisipasi sosial. Sebaliknya, siapa pun yang tinggal dalam wilayah desa adat, terlepas dari latar belakang agama, tetap memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam urusan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial di Bali dibentuk bukan berdasarkan eksklusivisme agama, melainkan berbasis pada sistem nilai lokal yang inklusif dan spiritual.

Studi lapangan di Desa Sembiran dan Penglipuran memperlihatkan bahwa warga Muslim dan Kristen dapat hidup berdampingan dengan umat Hindu tanpa mengalami marginalisasi. Mereka bahkan seringkali dilibatkan dalam acara adat seperti *ngayah*, *gotong-royong*, atau *ngeruat desa*. Hal ini mencerminkan model kohabitasi yang inklusif—suatu bentuk ketahanan sosial berbasis budaya lokal yang sangat jarang ditemukan di wilayah lain (Sugiharta, 2018; Pitana, 2014).

Implikasi Sosial-Politik: Rwa Bhineda sebagai Pilar Resolusi Konflik

Dalam konteks politik lokal, nilai *Rwa Bhineda* juga menjadi fondasi dalam meredam konflik kepentingan dan membangun konsensus sosial. Dalam beberapa kasus pemilihan kepala desa atau perbekel, masyarakat Bali lebih memilih figur yang mampu mewakili prinsip keseimbangan dan keadilan ketimbang representasi kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *Rwa Bhineda* telah melampaui batas religius dan menjadi landasan etis dalam perilaku politik masyarakat.

Lebih jauh, pendekatan berbasis *Rwa Bhineda* dapat menjadi inspirasi dalam formulasi kebijakan pluralisme dan resolusi konflik di Indonesia. Dalam konteks meningkatnya intoleransi dan polarisasi agama, model Bali menawarkan praktik kultural yang berbasis spiritualitas lokal, bukan semata pendekatan legal-formal yang seringkali gagal menyentuh akar budaya masyarakat (Hefner, 1997; Bagir, 2013).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Rwa Bhineda*, sebagai salah satu prinsip ontologis dalam filsafat Hindu Bali, tidak hanya memiliki makna simbolik atau ritualistik, tetapi telah berkembang menjadi kerangka berpikir kultural dan etika sosial yang sangat menentukan cara pandang masyarakat Bali terhadap keberadaan, keberagaman, dan hubungan antarmanusia. Dalam konteks kontemporer yang ditandai oleh pluralisme agama, kompleksitas identitas, dan potensi disintegrasi sosial, nilai-nilai *Rwa Bhineda* justru menunjukkan daya tahannya sebagai paradigma hidup (*living paradigm*) yang merekatkan komunitas, menegosiasikan perbedaan, serta memelihara harmoni dalam ruang sosial yang multikultural.

Secara simbolik, *Rwa Bhineda* tercermin dalam berbagai ekspresi budaya Bali, mulai dari struktur arsitektur pura, kesenian seperti tari Barong dan Rejang, hingga praktik pembagian ruang dalam sistem sosial. Konsep dualisme yang diusungnya bukan berarti dikotomi antagonistik, melainkan hubungan saling melengkapi antara dua kutub eksistensial—baik dan buruk, sakral dan profan, terang dan gelap—yang bersama-sama membentuk keutuhan realitas. Cara pandang ini memperkuat cara masyarakat Bali memahami dunia secara tidak dikotomis, sehingga menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam aspek budaya maupun keyakinan keagamaan. Dalam praktik kehidupan sosial-keagamaan, temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Bali menerapkan prinsip *Rwa Bhineda* sebagai dasar etika pluralisme. Relasi antarumat beragama di berbagai wilayah Bali, seperti Buleleng, Gianyar, dan Bangli, memperlihatkan bentuk kohabitasi yang sehat, di mana komunitas dengan latar belakang agama berbeda dapat hidup berdampingan dalam satu sistem adat yang sama tanpa harus kehilangan identitas

keagamaannya. Ini menunjukkan bahwa pluralisme yang dibangun di Bali bukan hanya koeksistensi formal, melainkan kohabitasi organik yang berbasis pada nilai-nilai lokal yang berakar kuat. Dalam perspektif teologi kontekstual, *Rwa Bhineda* dapat dikaji sebagai bentuk spiritualitas lokal yang mampu berinteraksi secara produktif dengan wacana teologis global mengenai pluralisme dan relasi antaragama. Sejalan dengan gagasan Diana Eck (2001) tentang pluralisme sebagai keterlibatan aktif terhadap keberagaman, serta visi *cosmotheandric* dari Raimon Panikkar (1984) yang menekankan keterhubungan antara Tuhan, manusia, dan kosmos, *Rwa Bhineda* menawarkan model teologi yang tidak menegaskan supremasi eksklusif suatu kebenaran tunggal, melainkan mengajak pada dialog kosmis yang saling melengkapi. Dalam hal ini, *Rwa Bhineda* tidak sekadar menjadi norma lokal, tetapi juga potensi epistemologis dalam konstruksi teologi lintas budaya.

Lebih jauh, nilai *Rwa Bhineda* terbukti menjadi fondasi penting dalam pembangunan ketahanan sosial masyarakat Bali. Ia tidak hanya hidup dalam tataran ideologis atau simbolik, tetapi direproduksi secara berkelanjutan melalui lembaga sosial seperti *pasraman*, seni pertunjukan, dan praktik adat desa. Nilai ini menjadi semacam *cultural software* yang membentuk pola pikir kolektif masyarakat Bali untuk menerima perbedaan sebagai keniscayaan kosmis, bukan sebagai ancaman. Ini menjadikan Bali sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerukunan sosial relatif tinggi, meskipun berada dalam struktur masyarakat yang sangat majemuk secara agama dan etnis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Rwa Bhineda* tidak hanya relevan sebagai warisan filsafat religius masyarakat Bali, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjawab tantangan sosial-keagamaan kontemporer, baik dalam skala lokal maupun global. Nilai ini dapat dijadikan sebagai model etika sosial dan teologi kontekstual yang inklusif, humanistik, dan berorientasi pada harmoni kosmis. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pluralisme agama dan resolusi konflik sosial seyogianya tidak hanya bertumpu pada mekanisme hukum formal atau wacana universalistik, melainkan juga menggali dan mengembangkan potensi lokal seperti yang ditawarkan oleh *Rwa Bhineda* dalam konteks Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambara, A. (2020). *Kosmologi Sosial Bali: Rwa Bhineda sebagai Dasar Hidup Kolektif*. Bali: Yayasan Damar Kencana.
- Ardhana, I. K. (2012). *Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Budaya Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Astika, I. M. (2019). *Filsafat Hindu Bali: Dualitas Kosmis dalam Kehidupan*. Denpasar: Pustaka Bali.
- Bandem, I Made & deBoer, Fredrik Eugene. (1995). *Kaja and Kelod: Balinese Dance in Transition*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Bagir, Z.A. (2013). *Pluralism, Religion and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Berger, P.L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bevans, S. B. (2002). *Models of Contextual Theology*. Maryknoll: Orbis Books.
- Cornille, C. (2013). *The Im-Possibility of Interreligious Dialogue*. New York: Crossroad Publishing Company.
- Dupuis, J. (2001). *Christianity and the Religions: From Confrontation to Dialogue*. Maryknoll: Orbis Books.
- Eck, D. L. (2001). *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*. San Francisco: HarperCollins.
- Effendy, Bahtiar. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Eiseman, F. B. (1990). *Bali: Sekala and Niskala, Volume I: Essays on Religion, Ritual and Art*. Berkeley: Periplus Editions.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hefner, R.W. (1997). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.

- Hick, J. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. New Haven: Yale University Press.
- Knitter, P. (2002). *Introducing Theologies of Religions*. Maryknoll: Orbis Books.
- Lansing, J. S. (2006). *Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali*. Princeton: Princeton University Press.
- Mudhofir, A., & Abdullah, I. (2021). *Radikalisme dan Budaya Damai di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Mudana, I Gede. (2014). "Rwa Bhineda: Konstruksi Filsafat Lokal Bali dalam Perspektif Hermeneutika Simbolik." *Jurnal Filsafat UGM*, Vol. 24, No. 2.
- Panikkar, R. (1984). *The Unknown Christ of Hinduism*. Maryknoll: Orbis Books.
- Song, C.S. (1986). *Third-Eye Theology: Theology in Formation in Asian Settings*. Maryknoll: Orbis Books.
- Sugiharta, D. (2018). "Pluralisme Agama dan Integrasi Sosial di Bali: Kajian pada Desa Penglipuran." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 87–101.
- Suryani, L.K. (2004). *Balinese Coping Mechanisms in Conflict and Change*. Denpasar: Suryani Institute.
- Thomas, M.M. (1976). *The Acknowledged Christ of the Indian Renaissance*. London: SCM Press.
- Pitana, I.G. (2014). *Desa Adat dan Transformasi Sosial di Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Picard, M. (2008). *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture*. Copenhagen: NIAS Press.
- Tim Penyusun Lontar Bali. (2016). *Rwa Bhineda dalam Konteks Kehidupan Bali Modern*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Suamba, I. G. N. (2020). "Konsep Rwa Bhineda dalam Wacana Toleransi dan Kehidupan Beragama di Bali." *Jurnal Ilmu Agama dan Budaya*, 18(2), 145–162.
- Titib, I. M. (2003). *Teologi dan Filosofi Hindu*. Surabaya: Paramita.